

EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN TERNAK DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Mohamad Ikbal

Mohikbal139@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Curbing livestock is an attempt to make the control of the maintenance of livestock are not grounded and live roam in public places. The aim of research to uncover why the policy of curbing livestock in the district Parigi Parigi district Moutong not implemented effectively and efficiently?. This type of research is used qualitative selection techniques and the number of informants purposively selected informants 8 people. The theory used evaluation model William N Dunn with aspects: effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness and accuracy. The results showed that the evaluation policy Animal Control in Sub Parigi Parigi district Moutong not deliver maximum results for its implementation has not been effective due to a lack of socialization and animal enforcement activities since the issuance of the regulations in 2005; inefficient due to the lack of operational funds allocated adequate control of cattle in each of the implementing agencies; but from the aspect of responsiveness and accuracy of that where regulation is appropriate and highly expected by the community because of the benefits that can be perceived by the public.

Keywords: *Evaluation of Policy, Regional Regulation, Control of Livestock.*

Pembangunan peternakan sebagai bagian dari pembangunan pertanian akan terkait dengan reorientasi kebijakan pembangunan pertanian. Pembangunan peternakan mempunyai paradigma baru, yakni secara makro berpihak kepada rakyat, adanya pendelegasian tanggungjawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diformulasikan suatu strategi dan kebijakan yang komprehensif, sistematis, terintegrasi baik vertikal maupun horizontal, berdaya saing, berkelanjutan, dan terdesentralisasi (Nugroho, 2012).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengeluarkan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak, yang pada pasal 5 disebutkan bahwa dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong pemilik ternak dilarang melepas serta menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, pembibitan, pekarangan rumah, pertamanan, lokasi wisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat

lain yang dapat menimbulkan kerusakan serta mengganggu keselamatan atau kelancaran pemakai jalan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada bulan Oktober - November 2014 di wilayah Kecamatan Parigi masih banyak terdapat hewan ternak yang berkeliaran dipekarangan rumah, fasilitas umum dan areal perkantoran serta di jalan raya. Hal ini disebabkan karena kurangnya tindakan penertiban hewan ternak oleh instansi dan aparat yang berwenang, bahkan bisa dikatakan terjadi pembiaran terhadap hewan ternak yang berkeliaran tersebut.

Dengan demikian pemerintah daerah melalui dinas teknis dan aparat yang berwenang seharusnya segera melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran secara tegas dan konsisten dengan menerapkan sanksi hukum agar dapat menimbulkan efek jera bagi warga yang melanggar peraturan daerah tersebut. Amri Yousa (2007:202) menyatakan bahwa "implementasi dapat dipandang sebagai

interaksi antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan yang mampu untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan dengan tujuan”.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan aspek efektivitas, aspek efisiensi, aspek kecukupan, aspek perataan, dan responsivitas?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dalam evaluasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, dengan metode kualitatif.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan pertimbangan bahwa di wilayah Kecamatan Parigi masih banyak terdapat hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di sekitar lokasi permukiman, perkantoran bahkan di jalan raya tanpa ada tindakan apapun dari instansi teknis dan aparat yang berwenang meskipun sudah ada Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak.

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.

Menurut Mantra (2008:34) penelitian deskriptif adalah : penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realita sosial yang kompleks dimasyarakat. Merujuk pendapat yang disampaikan Mantra tersebut, maka pendekatan penelitian deskriptif sangat sesuai untuk memahami dan

menggambarkan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat.

Jenis data yang dihimpun dan diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi.
2. Data sekunder antara lain berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang terkait.

Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknis analisis datanya sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*).
2. Penyajian data (*data display*).
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan pada fokus penelitian dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada kriteria model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Evaluasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan masyarakat dan fasilitas umum. Sejak diterbitkannya kebijakan penertiban ternak pada tahun 2005, pelaksanaan penertiban ternak hanya dilaksanakan sekitar 5-6 kali. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, kegiatan penertiban dan belum adanya alokasi dana operasional.

Pembahasan

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan.

Namun, evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian:

- a. Evaluasi awal, sejak awal sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*Ex-ante evaluation*).
- b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring.
- c. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Aspek Efektivitas

Terbukti bahwa dengan tidak jelasnya pengaturan siapa yang diberi tugas dan tanggung jawab di dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak, maka para birokrat mulai dari Dinas Pertanian dan Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun para Lurah dan Kepala Desa tidak tahu siapa sebenarnya yang harus menjadi *leading sector* dalam penertiban hewan ternak tersebut. Padahal apabila merujuk kepada bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sudah dinyatakan secara jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi pula oleh kebijakannya itu sendiri, karena sebaik apapun kualitas implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan apabila kualitas kebijakan yang diimplementasikan kurang baik ataupun kurang lengkap substansinya, maka hasil implementasinya pun tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Aspek Efisiensi

Secara konseptual bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus didukung dengan sumber daya antara lain

berupa biaya/ dana yang memadai.

Melaksanakan suatu kebijakan atau kegiatan apapun seharusnya didukung dengan dana yang memadai karena setiap pelaksanaan kegiatan apapun memang diperlukan dukungan biaya, tanpa dukungan biaya yang memadai maka kegiatan apapun tidak akan dapat terlaksana secara baik dan hasil yang dicapainya pun tidak akan optimal.

Aspek Kecukupan

Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak belum cukup untuk mengatasi masalah ternak yang berkeliaran karena masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan, lokasi perkantoran, lokasi permukiman, pasar dan lokasi fasilitas umum lainnya.

Aspek Perataan

Aspek perataan dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak tidak terjadi karena untuk pelaksanaan penertiban hewan ternak, tidak dialokasikan biaya operasional, baik kepada Dinas Pertanian dan Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan maupun kepada Desa-desanya sebagai pelaksana penertiban hewan ternak, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada aspek efisiensi di atas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak menjadi tidak maksimal.

Ketiadaan alokasi dana janganlah dijadikan satu-satunya alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan demi pemenuhan kepentingan masyarakat. Disini sebenarnya seorang pemimpin dituntut untuk melakukan perubahan *mind set* dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dari *task oriented* menjadi *service oriented* karena pejabat birokrasi pada dasarnya merupakan pelayan masyarakat yang seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dikelolanya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Aspek Responsivitas

Dasarnya masyarakat justru memiliki responsivitas yang baik terhadap penerapan penertiban tersebut. Dengan demikian sebenarnya para pelaksana Kebijakan itu yang harus memperbaiki sistem dan cara kerjanya dalam melaksanakan penertiban hewan ternak karena respon dari masyarakat pada dasarnya sudah sangat baik.

Aspek Ketepatan

Keberadaan kegiatan penertiban hewan ternak sangat diperlukan, baik oleh para birokrat pelaksana perda maupun oleh masyarakat karena masyarakat merasakan adanya manfaat dari adanya penertiban hewan ternak yang pemeliharaannya tidak dikendalikan dan berkeliaran di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu keindahan kota, ketertiban umum, kerusakan tanaman masyarakat oleh ternak dan kenyamanan pengendara di jalan raya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sangatlah tepat diterbitkannya Perda yang mengatur tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong masih belum efektif, hal ini dinilai dari 6 aspek kajian dalam penelitian ini, yaitu :

a. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Efektivitas dan Kecukupan; masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman penduduk, lokasi perkantoran dan fasilitas umum lainnya, hal ini disebabkan karena kurangnya keseriusan pemda dalam hal sosialisasi perda dan penertiban hewan ternak.

b. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Efisiensi dan Perataan; masih kurangnya kegiatan penertiban hewan ternak dan sosialisai serta pembinaan, hal ini disebabkan karena tidak di dukung dengan sumber daya berupa dana yang memadai.

c. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Responsivitas dan Ketepatan; bahwa kebijakan penertiban hewan ternak sudah tepat dan sangat diharapkan oleh birokrat pelaksana perda dan masyarakat, karena besarnya manfaat yang sangat dirasakan dalam penertiban ternak.

Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil penelitian, kiranya Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Parigi Moutong dilakukan revisi karena masih terdapat substansi penting yaitu siapa atau instansi mana yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penertiban hewan ternak belum diatur dalam pasal-pasalnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya saling lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak, sehingga bila ditinjau dari aspek efektivitas bahwa penertiban hewan ternak masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan penertiban.
2. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan, maka dalam pelaksanaan kebijakan termasuk Perda tentang Penertiban Hewan Ternak, perlu didukung dengan sumber daya yang memadai karena bila ditinjau dari aspek efisiensi, pelaksanaan Perda tersebut masih belum efisien yang disebabkan oleh sangat kurangnya alokasi biaya operasional penertiban hewan ternak.
3. Kiranya Perda Penertiban Ternak yang ada, ditindak lanjuti dengan pembuatan kebijakan turunannya berupa Peraturan Bupati yang memuat teknis operasional pelaksanaan penertiban ternak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada Bapak Dr. Darwis, M.Si dan Bapak Dr. Nurhamnis, M.Si yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd.Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cetakan Ketiga.
- BPS. 2014. *Pembangunan Kecamatan Parigi Dalam Angka*.
- Ciptono, Prapto. 2009. *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Guna Mewujudkan Kesadaran Warga di Kabupaten Jepara*. Tesis tidak diterbitkan. Malang. Program Studi Kebijakan Publik. Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Darwin. 1999. *Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan*. Melalui: <[https://www.google.com/search?q=bu ku+Darwin+tahun+1999&ie=utf-8&oe=utf8#q=http:%2F%2Ffringka.steori.blogspot.com%2F2012%2F06%2Ffaktor-penghambat-implementasi.html](https://www.google.com/search?q=bu+ku+Darwin+tahun+1999&ie=utf-8&oe=utf8#q=http:%2F%2Ffringka.steori.blogspot.com%2F2012%2F06%2Ffaktor-penghambat-implementasi.html)> Diunduh (27/01/15)
- Djaenuri Aries, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Widyapradja, Vol: XXXIII No. 3, hal. 226, 2007, Jakarta Selatan.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Penyunting Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 1995. "Penilaian kinerja Organisasi Pelayanan Publik". Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hy.kurniawan. 2009. *Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan*. Melalui: <<http://hykurniawan.wordpress.com>>. Diunduh (27/01/15).
- Keban, Yeremias. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kusumastuti Dyah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Widyapradja, Vol : XXXIII No. 1, hal. 43, 2007, Jakarta Selatan.
- Mantra, Ida Bagus. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Miles, Mathew B dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir Darwin. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Wibawa, Samodra, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Edisi Kedua.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- , 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- , 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo-Kelompok Gramedia, Edisi keempat, Revisi 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penertiban Ternak.
- Purna, I Wayan Gede. 2014. *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong*. Tesis tidak diterbitkan. Palu. Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.
- Rochyati, 2012. *Evaluasi Kebijakan Publik-Web Dosen-Unair*. Melalui: <http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69585-Umum> (16/09/2013)
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Santoso, 2008. *Mendefenisikan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Grasindo
- Satori, D. dan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:
- Siagian, Sondang. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, A. 2010. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak terhadap Perilaku Masyarakat Peternak di Kabupaten Bojo Negoro*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang. Program Studi Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-6.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, 2007. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yousa Amri, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Widyapradja, Vol : XXXIII No. 3, hal. 202, 2007, Jakarta Selatan.